BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Biasanya surat edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya.

Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan:¹

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

¹ Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-nomor-06-x-2015-html>, Diunduh 11 Desember 2015, Pukul 13.30 Wib.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:²

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: ³

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:⁴

“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm 3.

⁴ *Ibid.*

meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, dan *blog-blog independent*, yang keberadaannya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

Sebuah contoh terkait penggunaan media sosial misalnya, media sosial dijadikan sebagai media kampanye politik yang efektif menghasilkan banyak pendukung, seperti pada Pemilihan Presiden (PilPres) Indonesia tahun 2014 yang menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden atau saat pemilihan presiden Amerika Serikat menjadikan Barack Obama Presiden Kulit Hitam pertama di negeri tersebut. Kemudian banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai tempat jual-beli barang online seperti; kendaraan bermotor, property perumahan, barang elektronik bahkan makanan, sehingga manfaat dari media sosial ini menjadi lahan pekerjaan yang baru bagi masyarakat.

Segala sesuatu dimana pun dan kapan pun selalu berpasang pasangan, begitu juga halnya dengan dampak terhadap keberadaan sesuatu. Selain memiliki sisi positif juga terdapat sisi negatif, maka begitu juga halnya dengan media sosial yang selain memiliki dampak positif juga dampak negatif. Sisi positif media sosial diantaranya yaitu kemudahan informasi

karena sesama pengguna media sosial dapat saling terhubung dan berbagi. Sedangkan sisi negatif dari media sosial yaitu maraknya ujaran kebencian atau *hate speech*, sehingga jika setiap hari hal ini terjadi dan bertambah banyak, maka dapat berdampak atau berpotensi pada timbulnya perpecahan di tengah masyarakat.

Guna menghindari perpecahan atau konflik masyarakat di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan heterogen, juga agar masyarakat terdidik untuk lebih bertanggung jawab dalam berucap dan lebih mengendalikan ucapannya, maka perlu didukung langkah Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tersebut, tetapi perlu juga diantisipasi adanya kemungkinan oknum yang menyalahgunakan penerapan SE/06/X/2015 untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu dan kelompok masyarakat karena alasan-alasan tertentu.

Penyalahgunaan fungsi dari SE/06/X/2015 tersebut, akan membawa Indonesia kembali kepada sebuah jaman dimana tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang terjadi pada era Orde Baru, yakni jaman dimana banyak pendapat-pendapat yang terbatas, demi melindungi perut sendiri dan kelompok-kelompok tertentu atau para pemangku kepentingan yang dalam realitanya sangat sulit tersentuh hukum.

Beberapa pekan yang lalu, melalui media sosial masyarakat telah memberikan komentarnya terhadap beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia, yang disatu sisi dikatakan sebagai bentuk sanksi sosial masyarakat

terhadap para pelaku pelanggaran hukum, tetapi disisi lain telah dianggap sebagai perbuatan ujaran kebencian.

Ade Mulyana dalam tulisannya menyebutkan beberapa contoh kasus dimana masyarakat memberikan komentar:⁵

“Sebut saja kasus Dirut PT Pelindo (Persero) RJ Lino, yang bahkan membuat (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso harus kehilangan jabatannya karena mau memproses skandal korupsi Dirut Pelindo II itu. Masyarakat sosial media dengan penuh kesadaran menggalang kebencian kepada RJ Lino yang "kebal hukum". Atau kasus perusahaan besar seperti PT Sinar Mas, PT Wilmar, dan perusahaan besar lain yang menyebabkan hutan-hutan Indonesia terbakar dan mengasapi langit se-ASEAN. Perusahaan-perusahaan besar tersebut dalam media sosial di-*bully* karena memang tak bisa disentuh hukum”.

Febri Ali Aldi dalam tulisannya juga menyebutkan beberapa contoh kasus dimana masyarakat memberikan komentar:⁶

“Kasus pak sopir taksi yang mengajari polisi memahami arti kata berhenti dan parkir. Sebuah video di unggah melalui *youtube* atas nama Muhamad Mulyo Malik pada 26 Desember 2015 menarik perhatian masyarakat pengguna media sosial (*nitizen*). Dimana Iptu Abdul Aziz melakukan penilangan terhadap sopir taksi dikarenakan berhenti di area rambu lalu lintas dilarang parkir. Sopir taksi melakukan pembelaan dengan menjelaskan perbedaan dilarang berhenti/stop dengan dilarang parkir sehingga adanya perdebatan yang cukup lama. Dalam video berdurasi tiga menit dua puluh detik, penjelasan dari sopir taksi tersebut sesuai ketentuan didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , akan tetapi polisi dalam hal ini masih melakukan penilangan terhadap sopir taksi”.

⁵ Ade Mulyana, Surat Edaran Kapolri Justru Menuai Kebencian, <http://www.rmol.co/read/2015/11/01/222972/Surat-Edaran-Kapolri-Justru-Menuai-Kebencian->, Diunduh 11 Desember 2015, Pukul 13.10 Wib, hlm 1-2.

⁶ Febri Ali Aldi, Surat Edaran Kapolri Justru Menuai Kebencian, http://m.kompasiana.com/pak-sopir-taksi-mengajari-polisi-memahami-arti-berhenti-dan-parkir_56a2140220afbdb1082760ac. Diunduh 29 Desember 2015, Pukul 13.10 Wib, hlm 1.

Berikut ini dikemukakan oleh Pratama Pictures beberapa kalimat ujaran kebencian yang dilakukakan oleh masyarakat:⁷

Insane Wayne: “Super bodoh, arogan, *very very stupid blunder*, bikin malu institusi yang sedang memperbaiki citra kepolisian”.

Davi Na: “Goblok banget tuh polisi gak bisa membedakan stop sama parkir”, dan banyak lagi komentar yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar penulisan penelitian ini sesuai dengan kajian judul yang dibahas, maka penelitian membatasi masalah dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 ?
2. Mengapa penerapan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 perlu di sosialisasikan ke masyarakat ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat terhindar dari perbuatan ujaran kebencian ?

⁷ Pratama Pictures, *Polisi Vs Sopir Taksi*, Youtube, Diunduh 29 Desember 2015, Pukul 13.30 Wib, hlm 1.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Alasan perlunya sosialisasi penerapan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat terhindar dari perbuatan ujaran kebencian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya pembalakan liar, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif bagi instansi Polri agar di kemudian hari dapat berperan serta dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan melindungi masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani permasalahan Penanganan Ujaran Kebencian.

- c. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan surat edaran Kapolri.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap negara pasti mempunyai pondasi/pilar/dasar-dasar negara, begitu halnya juga dengan negara Indonesia, negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar. Konsep ini digagas oleh (alm) Taufik Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat.

Pancasila merupakan Ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Dalam paragraf ke-4 *Preamble* (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa:⁸

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar (amandemen)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 8.

dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pilar berikutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Indonesia. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki Undang-undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara.

Dalam alenia ke-empat Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:⁹

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang

⁹ *Ibid*, hlm 10.

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai wujud dari tujuan di atas, pemerintah mengeluarkan aturan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan yang terjadi di dalam Negara Republik Indonesia ini diatur oleh hukum, tidak terkecuali hal yang mengatur mengenai kesetaraan kedudukan antar manusia. Dan demi tercapainya kesejahteraan umum yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat dari kemajuan era globalisasi dimana teknologi menjadi semakin maju pesat setiap tahunnya.

Terlebih dalam era globalisasi, hukum harus dapat mendukung dan mengimbangi tumbuhnya dunia teknologi karena semua dapat di akses melalui internet, mulai dari kampanye, jual beli *online*, mencari teman baik di wilayah negara sendiri bahkan luar negeri, apa pun sekarang bisa di akses oleh internet.

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk memperjuangkan hal yang memang telah menjadi hak kodratnya, dalam hal ini diatur dalam Pasal 28 H angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm 34.

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Hukum adalah bagian terpenting dari suatu negara dimana hukum memberikan peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan yang mengikat pada setiap warga negaranya, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu peran hukum lain yaitu memberikan jaminan kepastian hukum.

Dalam ranah pidana jaminan tersebut ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan:¹¹

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Ujaran kebencian dalam hal ini sudah banyak diatur, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Eletronik, tetapi kemudian ditambah lagi dengan diatur dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Ujaran kebencian sejatinya telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang khusus lainnya. Pada KUHP ujaran kebencian ada dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ujaran kebencian ada dalam Pasal

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 3.

28 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berisi:¹²

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang berisi:¹³

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang berisi:¹⁴

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:¹⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

¹² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2010.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronikcom>, Diunduh 10 Desember 2015, Pukul 13.03 Wib.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:¹⁶

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pengertian hukum sebagaimana dikutip dari wikipedia adalah:¹⁷

“Sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat.”

Hukum dibagi menjadi berbagai bidang yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah mengenai hukum pidana, hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik, hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh perundang-undang dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan atau denda bagi pelanggarnya, hukum didalamnya pula terdapat aparat yang bertugas untuk menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lainnya yang disebut sebagai aparat penegak hukum.

Perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau sanksi adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun pengertian pelaku kejahatan adalah:¹⁸

¹⁶ <http://hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronikcom>, Diunduh 10 Desember 2015, Pukul 13.03 Wib.

¹⁷ *Wikipedia, Pengertian Hukum*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum>, Diunduh selasa 16 Desember 2015, pukul 18.28 Wib, hlm 1.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 11.

“Orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya lagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundangan-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat, tetapi orang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tanpa terkecuali seorang anak, karena seorang anak pun dapat melakukan suatu kejahatan dikarenakan beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Hukum menurut pandangan Max Weber merupakan:¹⁹

“Perpaduan antara konsensus dan paksaan. Dikatakan demikian karena tegaknya tatanan hukum itu berbeda dengan tatanan dari norma sosial lain yang bukan hukum, karena tatanan hukum ditopang sepenuhnya oleh kekuasaan pemaksa yang dipunyai negara, khususnya Hukum Pidana”.

Penelitian ini menggunakan juga beberapa asas sebagai pisau analisa yaitu asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP.

Selain asas legalitas dalam hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menurut Jeremy Bentham:²⁰

“Mewajibkan dalam hukum yang berlaku di suatu negara, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, karena ini akan membuat hukum suatu negara menjadi tidak pasti karena terjadi sebuah kontradiksi.”

¹⁹ Wordpress, Pandangan Hukum Menurut Ahli
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-max-weber/>, Di unduh pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 20.07 WIB. hlm 2.

²⁰ Wordpress, Pandangan Hukum Ahli -Ahli,
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-jeremy-bentham/>, Diunduh pada tanggal 29 Desember 2015, pukul 20.040 wib, hlm 2.

Asas kepastian hukum ini juga akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara. Peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku.

Selain asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas kaitannya dengan Teori *Stufen Bow* atau Teori *Aquo* karya Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam Teori *Aquo* membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan. Menurutnya apabila terjadi pertentangan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya. Teori ini kemudian menjadi semakin jelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebuah teori lagi yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Utilitarianisme John Stuart Mill:²¹

²¹ Wordpress, pandangan hukum ahli
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-j.stuart-mill/>,
Diunduh pada tanggal 29 Desember 2015, pukul 20.07 wib, hlm 1.

“Teori kebahagiaan terbesar *“The greatest happiness of the people”* bahwa yang berguna, bermanfaat, dan menguntungkan untuk kaum mayoritas maka itulah yang baik.”

Mengenai tindak pidana, Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.” Sedangkan Simons memberikan rumusan yang lebih lengkap mengenai *strafbaar feit*,²² yaitu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Lain lagi menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah²³:

“Kelakuan orang (*menselitjke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijk, onrechtmatigheid*)”.

Dengan adanya Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian masyarakat dalam hal ini terbatas dan berhati-hati dalam menyampaikan suatu komentar baik melalui media sosial dan di muka umum, belum lagi seharusnya media pers juga harus bisa memilah peristiwa dikarenakan apabila ada suatu kasus maka harus benar-benar kasus

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 185.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54-56.

tersebut benar apabila salah maka Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian bisa menjerat para pembuat berita tersebut.

Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan Surat Edaran (SE) ke dalam bentuk:²⁴

“*Quasi legislation* yang berisi norma-norma aturan yang bersifat administratif yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman kerja. Adapun menurut Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ditegaskan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Sedangkan jika kita kaji melalui Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain selain yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahkan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memuat 2 (dua) syarat, yaitu (1) Diperintahkan oleh Undang-undang dan (2) Dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, pengkajian terhadap suatu Surat Edaran mengacu pada kedua syarat tersebut. Namun, jika tidak terpenuhinya kedua syarat itu maka suatu Surat Edaran hanya merupakan aturan internal yang tidak dapat memuat norma hukum baru”.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

²⁴ Rocky Marbun, Surat Edaran Kapolri: Serial Kegaduhan Hukum, <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2015/11/06/surat-edaran-kapolri-serial-kegaduhan-hukum/>, Diunduh 15 Desember 2015, Pukul 12.00 Wib, hlm 2-3.

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Sebagaimana diungkapkan Ronny Hanitidjo Soemitro, penelitian *Deskriptif-Analitis* yaitu:²⁵

“Menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.

Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi tentang problematika Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian Dihubungkan

²⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

Dengan Prinsip Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif,²⁶ yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan menggunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penyusun melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data

²⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 29.

sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²⁷

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.

Terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Undang-Undang

²⁷*Ibid*, hlm 11.

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer dan objek penelitian (Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015), seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, hasil seminar, serta bibliografi hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa data yang diperoleh dari kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara melakukan pencarian dan pengumpulan data dari instansi terkait dan

melakukan wawancara dengan orang-orang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Studi dokumen²⁸, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada efektifitas dari Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 kepada masyarakat.
- b. Wawancara²⁹, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI).

5. Alat Pengumpul Data

- a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

²⁸*Ibid*, hlm 52.

²⁹*Ibid*, hlm 57.

b. Data Lapangan

Ada pun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa *notebook*, *flashdisk*, dan alat tulis yang berguna untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non't directive interview*) serta menggunakan *tape recorder* untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, penulis sebagai instrumen analisis akan menggunakan metode Yuridis-Kualitatif. Metode normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden. Menurut Ronny Hantijo Soemitro yang dimaksud dengan analisis Yuridis-Kualitatif adalah:³⁰

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang dihasilkan dari data Deskriptif-Analitis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari

³⁰ Ronny Hantijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 93.

sebagai sesuatu yang utuh tanpa harus menggunakan rumus matematika”.

Digunakannya metode Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan ujaran kebencian, dalam hal ini adalah masyarakat khususnya pengguna media sosial, atas penerapan aturan larangan ujaran kebencian. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatur, perundang-undangan, contoh kasus yang berkaitan, dan hasil wawancara dengan pengguna media sosial yang menggunakan media sosial. Kemudian data tersebut diolah dan akan diperoleh gambaran apakah suatu aturan telah bertentangan dengan aturan yang lainnya, apakah penanganan ujaran kebencian yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat, antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Instansi/Lembaga

- 1) Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110.
- 2) Kantor Polisi Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No. 748
Bandung.
- 3) Kantor Polisi Resort Kota Besar Bandung, Jalan Merdeka No. 18-
20 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi :”Tinjauan Hukum Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian”

Nama : Adri Yudhianto

No.Pokok Mahasiswa: 121.000.245

No.SK Bimbingan : 239/Unpas.FH.D/Q/XI/2015

Dosen Pembimbing : Gialdah Tapiansari B., S.H.,M.H.

NO	KEGIATAN	JADWAL PENELITIAN					
		Nop- 2015	Des- 2015	Jan- 2016	Feb- 2016	Mar- 2016	Apr- 2016
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komperhensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						